

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan suatu instansi. Dalam tata kelola pada dasarnya melibatkan hubungan antara para pemangku kepentingan serta tujuan pengelolaan instansi. Karena dalam tata kelola menyediakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan instansi. Adanya tata kelola di suatu instansi akan berguna untuk mengarahkan dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan undang-undang dan mematuhi norma dan etika yang berlaku. Tata kelola di suatu instansi baik dalam bidang pendidikan maupun non-pendidikan perlu dilakukan guna mengatur segala aktivitas performa instansi. Tata kelola dalam bidang pendidikan memiliki banyak aspek, salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan dalam mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pencatatan, pembiayaan, pemantauan, dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan di bidang pendidikan merupakan peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan. Setiap satuan pendidikan tentunya memiliki ketentuan tersendiri mengenai pengelolaan keuangan, baik dana yang berasal dari negara ataupun dari warga negara. Di dalam tata kelola keuangan sekolah tentunya harus memiliki prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan sebagai faktor kunci penilaian agar tercapainya tata kelola yang baik.

Prinsip pertama adalah fleksibilitas, yang berarti bahwa dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Menurut Aqna (2022) berpendapat bahwa dalam fleksibilitas pengelolaan dana sekolah menurut Rencana Kerja dan Anggaran sekolah, hasil Evaluasi Diri sekolah menentukan manajemen dana. Serta dana digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Prinsip selanjutnya adalah efektivitas yang berarti penggunaan dana yang diharapkan dapat menghasilkan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dengan adanya efektivitas di dalam pengelolaan keuangan, pihak sekolah dapat merealisasikan perencanaan yang telah disusun di awal agar pengelolaan keuangan bisa terstruktur dan terencana dengan baik. Prinsip efisiensi memiliki arti bahwa cara penggunaan dana sekolah untuk meningkatkan pendidikan siswa dengan biaya yang paling rendah dan hasil yang paling baik. Tentunya pihak sekolah akan meminimalkan pengeluaran dengan harapan dari pengeluaran dana tersebut dapat meningkatkan mutu pembelajaran sehingga berdampak pada sekolah yang nantinya akan dikenal sebagai sekolah yang maju.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu media pertanggungjawaban yang diterapkan secara berkala pada sasaran dan tujuan yang ditetapkan di awal, disertai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi. Menurut I Made Astra, Putu, I Nengah, dan I Made Sutika (2022) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sebuah ukuran yang tidak terpisahkan dari kuat lemahnya keterlibatan masyarakat. Akuntabilitas merupakan hal mendasar dalam proses pengelolaan keuangan

dan bertanggung jawab atas tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat. Dan akuntabilitas keuangan merupakan wujud tanggung jawab suatu institusi terhadap pengelolaan sumber daya dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Eni (2020) pentingnya akuntabilitas keuangan pendidikan merupakan sebagai wujud pengendalian dari masyarakat karena masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dalam pendidikan.

Di dalam tata kelola keuangan sekolah tentunya juga harus memiliki prinsip transparansi. Transparansi merupakan terbukanya informasi secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam penelitian Anggita Rizki (2021) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan pada satuan pendidikan penting untuk diperlukan guna meningkatkan kualitas sekolah, karena sekolah yang berkualitas tinggi akan mendapatkan dukungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung semua program pendidikan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selain itu, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah, orangtua serta warga sekolah karena dapat memberikan informasi yang mudah diakses dan akurat serta lengkap.

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, pemerintah tentunya menyediakan dana bantuan kepada satuan pendidikan di Indonesia yang telah memenuhi syarat. Salah satu sumber pembiayaan untuk sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah atau

yang lebih sering disebut dana BOS adalah dana bantuan yang bertujuan untuk membiayai biaya-biaya operasional non personalia dalam menunjang pembelajaran yang berkualitas dan lebih optimal. Dana BOS diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengatur cara pengelolaan dana BOS.

Saat ini pendidikan di Indonesia mengalami perubahan kebijakan kurikulum dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan. Merdeka Belajar adalah kebijakan kurikulum terbaru yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menurut Suhartono (2022), merdeka belajar dimaksudkan untuk memberikan siswa kesempatan yang luas dalam menggunakan kegiatan ilmiah di sekolah untuk meningkatkan potensi dan keterampilan mereka. Nantinya akan menghasilkan siswa yang cerdas tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga non akademik melalui proses pendidikan yang berkualitas tinggi yang memprioritaskan semua jenis kegiatan belajar yang diperlukan oleh setiap siswa untuk mengembangkan pemikiran mereka.

Komponen pendukung yang diperlukan dalam pembelajaran dengan kurikulum merdeka adalah salah satunya fasilitas dan infrastruktur sekolah yang memadai. Tanpa kesiapan fasilitas dan infrastruktur yang memadai,

kurikulum merdeka dapat menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan sekolah. Dalam penelitian Andriana dan Alifia (2022) berpendapat bahwa infrastruktur pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam mendukung hasil belajar siswa agar tercipta kondisi yang kondusif dalam proses pembelajaran. Ruang pembelajaran yang nyaman dan fleksibel merupakan faktor penting dalam mendukung pembelajaran Kurikulum Merdeka. Sekolah perlu memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung, seperti memadainya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang seni, dan area kolaborasi. Selain itu, pengaturan ruang yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran juga harus diperhatikan.

Pengelolaan dana BOS dalam mendukung kurikulum merdeka perlu untuk diperhatikan bagi satuan pendidikan guna menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran yang berbasis pada Pancasila. Dana BOS berperan penting dalam tata kelola keuangan sekolah. Menurut Rita dan Mukhamad (2020), dana BOS diberikan kepada satuan pendidikan untuk membantu pendanaan siswa dalam mendukung infrastruktur/ prasarana pendidikan, serta pemeliharaan dan perbaikan sekolah. Dengan adanya dana BOS diharapkan satuan pendidikan dapat meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah. Dalam rangka menunjang program Kurikulum Merdeka, diharapkan dana BOS dapat dikelola secara akuntabel oleh satuan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan peraturan, pengelolaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk melibatkan masyarakat dalam pengendalian satuan pendidikan serta sebagai bentuk

pertanggungjawaban kewajiban di satuan pendidikan dalam pengelolaan dana BOS.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Tina (2021) permasalahan yang terjadi pada satuan pendidikan dalam mengelola dana BOS dimulai dari alokasi yang tidak setara dengan kebutuhan di sektor pendidikan, pengelolaan dana BOS yang tidak efektif, kurangnya partisipasi orang tua dalam pengelolaan dana BOS seperti perencanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta pelaporan. Satuan pendidikan dalam pembelanjaan dana BOS bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya sehingga di dalam pengelolaan dana BOS kurang tersampainya maksud dan tujuan adanya dana BOS dari pemerintah. Menurut Mujiono (2017), permasalahan lain yang terjadi pada satuan pendidikan dalam mengelola dana BOS adalah seperti pengelolaan dana BOS di sekolah tidak mengikuti petunjuk teknis, kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi, dan pengelolaan yang sengaja tidak transparan-tidak disosialisasikan atau tidak dipasang papan informasi mengenai dana BOS dan hanya kepala sekolah dan bendahara BOS yang mengetahui tentang pengelolaannya. Komite sekolah tidak ikut berperan dalam pengelolaan ini sehingga dapat berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS. Banyak sekolah yang masih belum mau melaporkan penggunaan dana BOS secara publik dan cenderung tidak mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi. Menurut Eni (2020), sekolah mencoba mengurangi partisipasi komite sekolah dan orang tua hanya dengan menghadiri pertemuan,

menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan melaporkannya sesuai dengan kebijakan manajemen sekolah.

Tidak ada pengawasan yang kuat dari pemerintah terhadap penggunaan dana BOS, sehingga pihak sekolah bisa saja tidak transparan dan memanipulasi informasi tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Seperti yang terjadi pada salah satu satuan pendidikan di Provinsi Jawa Timur yaitu SMP Negeri 6 Bojonegoro yang terduga melakukan korupsi dana BOS Tahun 2020/2021 (Sumber: surabaya.kompas.com). Hal tersebut dapat terjadi karena pihak kepala sekolah dalam mengelola dana BOS melakukan penggelembungan harga atau *mark up* penggunaan dana BOS. Selain itu, terindikasi bahwa dana yang diberikan pemerintah dalam menunjang pembelajaran tidak sesuai peruntukannya serta dalam pembelanjaan dana BOS terdapat pengeluaran anggaran di luar rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Dalam perencanaan dana BOS, tentunya pihak kepala sekolah perlu memperhatikan aspek-aspek kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan di dalam menunjang pembelajaran. Sehingga nantinya pada saat dana BOS tersalurkan, dana tersebut dapat digunakan dalam membantu tercapainya tujuan sekolah untuk mencerdaskan anak yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Pada tahun 2020, sekolah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Budi Utomo (YPBU) desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten ombang yakni sekolah pada tingkat SMP terduga kasus korupsi dana BOS dan

PIP (Sumber: www.radarjatim.co). Para wali siswa merasa bahwa hak dari siswa berupa dana BOS dari Pemerintah Pusat yang tidak diberikan semestinya pada siswa termasuk anggaran yang tidak wajar dimasukkan dalam anggaran Dana Sarana Pendidikan (DSP) dan lain-lain yang sudah tercover dalam dana BOS. Ini dapat terjadi karena kurang tertatanya dalam pengelolaan anggaran di setiap satuan pendidikan disertai dengan kurangnya komunikasi dan kejelasan antara pihak sekolah dengan para wali siswa mengenai pengelolaan dana BOS.

Salah satu sekolah swasta unggulan yang menerapkan pendidikan Al-Islami di Jombang adalah SMP Islam Cendekia Harapan (SICH). SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) merupakan kategori dalam sekolah tingkat menengah pertama (SMP). Menjadi salah satu sekolah unggulan pada tingkat SMP dengan menerapkan pendidikan Al-Islami tentunya tidak luput dari pengawasan masyarakat tentang tata kelola keuangan yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran agar dapat menciptakan lulusan-lulusan yang berprestasi. Di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) sendiri telah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2021/2022. Pada tahun 2022, SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang menjadi sekolah penggerak dan siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka bagi siswa kelas 7. Setelah lolos seleksi, SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) membentuk komite pembelajaran dan melatih para tenaga pendidik kelas 7 untuk menerapkan kurikulum terbaru tersebut. Tentunya dalam mempersiapkan pembelajaran

yang berbasis kurikulum merdeka, pihak sekolah perlu merencanakan pembiayaan dana BOS di dalam penyusunan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) sebagai acuan dasar dalam menunjang kurikulum merdeka. Tidak luput terjadi kemungkinan penyelewengan di dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah unggulan yang menerapkan pendidikan Al-Islami di tingkat SMP, salah satunya adalah SMP Islam Cendekia Harapan (SICH). Karena di dalam kurikulum merdeka setiap satuan pendidikan diuntut untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran seperti pada komponen pusat sumber belajar yakni memadainya fasilitas ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang seni, area kolaborasi sehingga nantinya para siswa bisa bebas untuk belajar dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pihak sekolah tentunya harus bisa mengelola dana BOS dengan fleksibel, efektif, efisien, akuntabel dan transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan dana BOS. Pihak sekolah harus mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam juknis (petunjuk teknis) Pengelolaan Dana BOS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

Berdasarkan dari uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang “Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang?
2. Bagaimana fleksibilitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang?
3. Bagaimana efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang?
4. Bagaimana efisiensi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang?
5. Bagaimana akuntabilitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang?
6. Bagaimana transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang.

2. Fleksibilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang.
3. Efektivitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang.
4. Efisiensi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang.
5. Akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang.
6. Transparansi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam menunjang implementasi kurikulum merdeka di SMP Islam Cendekia Harapan (SICH) Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai cara untuk menambah dan memperluas wawasan maupun pengetahuan dengan menghubungkan teori yang ada dengan fenomena dan hasil empiris, sekaligus memperdalam ilmu yang diperoleh dalam program studi Akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan.
- b. Bagi Sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam mempertimbangkan dan menilai cara mengelola dana BOS secara efektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Bagi Instansi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan membantu atau bisa menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan pengelolaan dana BOS.